



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 70 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2019-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pemerintah Kota Padang dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis telah ditetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 10);
 - b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, maka peraturan Wali Kota tersebut perlu diubah dan disesuaikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);

10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 6);

11. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PADANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019-2024.

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Wali Kota Padang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 10) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang

pada tanggal 13 Agustus 2021

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang

pada tanggal 13 Agustus 2021

PLH. SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG



EDI HASYMI

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA PADANG
 NOMOR 70 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
 PADANG NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH
 DAERAH TAHUN 2019-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH DAERAH

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------|-------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Meningkatnya Kualitas Pendidikan Dasar | Rata-rata lama sekolah | <i>rata – rata lama sekolah pada tahun n</i> | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Harapan lama sekolah | <i>rata – rata harapan lama sekolah pada tahun n</i> | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Rata-rata nilai kelulusan SD | <i>rata – rata nilai kelulusan SD pada tahun n</i> | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| | | Rata-rata nilai kelulusan SMP | <i>rata – rata nilai kelulusan SMP pada tahun n</i> | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan |
| 2. | Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat | Angka Harapan Hidup | <i>Angka perkiraan lama hidup rata – rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas</i> | Dinas Kesehatan |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Meningkatnya Kesetaraan Gender | Indeks Pembangunan Gender (IPG) | $\frac{\text{Indeks Pembangunan Manusia Perempuan}}{\text{Indeks Pembangunan Manusia Laki - laki}} \times 100\%$ | DP3AP2KB |
| 4. | Meningkatnya Daya Saing Daerah | Indeks inovasi daerah | <i>Indeks inovasi daerah pada tahun n</i> | Bappeda |
| 5. | Menurunnya Luas Kawasan Banjir dan Genangan | Persentase luas kawasan bebas banjir | $\frac{\text{luas kawasan bebas banjir}}{\text{jumlah kawasan Kota Padang}} \times 100\%$ | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang |
| 6. | Meningkatnya Ketenteraman, Ketertiban dan Keamanan didalam Masyarakat | Angka Kriminalitas | <i>Angka Kriminalitas pada tahun n</i> | Satpol PP |
| 7. | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup dan Sanitasi | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | <i>Nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun n</i> | Dinas Lingkungan Hidup |
| | | Luas Kawasan Kumuh yang ditangani | <i>Luas Kawasan kumuh yang ditangani pada tahun n</i> | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | Indeks Sanitasi | <i>Indeks Sanitasi pada tahun n</i> | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 8. | Meningkatnya Kesempatan Kerja | Tingkat Pengangguran Terbuka | $\frac{\text{Jumlah pengangguran terbuka}}{\text{Jumlah keseluruhan pengangguran}} \times 100\%$ | Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |
| 9. | Meningkatnya Tingkat Perekonomian Penduduk | Tingkat Kemiskinan | $\frac{\text{Jumlah penduduk miskin}}{\text{Jumlah keseluruhan penduduk pada tahun n}} \times 100\%$ | Dinas Sosial, Bappeda |
| | | PDRB Per-kapita | $\frac{\text{Pendapatan Domestik Regional Bruto}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$ | Bappeda |
| 10. | Menjadikan Sektor Perdagangan sebagai Penggerak Utama Perekonomian | Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB | $\frac{\text{Kontribusi Sektor perdagangan}}{\text{Produk Domestik Regional Bruto}} \times 100\%$ | Dinas Perdagangan |
| 11. | Menjadikan Kota Padang sebagai Pusat Ekonomi Kreatif | Pertumbuhan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (e-kraf) | $\frac{\text{jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif (tahun n)} - \text{jumlah pelaku usaha ekonomi kreatif}(n - 1)}{\text{jumlah pelaku usaha kreatif tahun n}} \times 100\%$ | Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 12. | Mewujudkan Kota Padang menjadi tujuan Pariwisata yang unggul dan Berdaya Saing | Kontribusi Sektor Pariwisata Kota Padang terhadap Pariwisata Provinsi Sumatera Barat | $\frac{\text{Jumlah PDRB Pariwisata Kota Padang}}{\text{Jumlah PDRB Pariwisata Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$ | Dinas Pariwisata |
| | | Jumlah Kunjungan Wisata Mancanegara | <i>Jumlah kunjungan wisata mancanegara pada tahun n</i> | Dinas Pariwisata |
| | | Jumlah Kunjungan Wisata Domestik | <i>Jumlah kunjungan wisata domestik pada tahun n</i> | Dinas Pariwisata |
| 13. | Meningkatnya Kelurahan Tangguh dan Tanggap Bencana | Persentase Peningkatan Kelurahan Tangguh dan Tanggap Bencana | $\frac{\text{Jumlah kelurahan tangguh dan tanggap bencana}}{\text{Jumlah Kelurahan}} \times 100\%$ | BPBD |
| 14. | Menurunnya Tingkat Resiko Bencana | Indeks Ketahanan Daerah | <i>Nilai indeks ketahanan daerah pada tahun n</i> | BPBD |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15. | Meningkatnya Kemampuan Penanggulangan Bencana | Persentase Bencana yang Tertangani | $\frac{\text{Jumlah bencana yang tertangani}}{\text{Jumlah bencana yang terjadi}} \times 100\%$ | BPBD |
| 16. | Menurunnya Jumlah Kerugian Akibat Kebakaran (material) | Respon Time (waktu) | <i>Rata – rata respon time (waktu) pada tahun n</i> | Dinas Pemadam Kebakaran |
| 17. | Meningkatnya Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel | Opini BPK Atas Laporan Keuangan | <i>Opini BPK atas laporan keuangan pada tahun n</i> | BPKAD, Inspektorat |
| 18. | Meningkatnya Kinerja Birokrasi | Nilai SAKIP | <i>Nilai SAKIP Kota Padang pada tahun n</i> | Inspektorat, Bappeda, Bagian Organisasi |
| | | Nilai Laporan Penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) Kota | <i>Nilai laporan penyelenggaran Pemerintah Daerah (LPPD) pada tahun n</i> | Bagian Tata Pemerintahan |

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Penjelasan | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 19. | Meningkatnya Pelayanan Publik Yang Berkualitas | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Publik | <i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan publik pada tahun n</i> | Bagian Organisasi |
| Indeks Kemudahan Berusaha | | <i>Nilai indeks kemudahan berusaha pada tahun n</i> | DPMPTSP | |
| Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) | | <i>Nilai Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada tahun n</i> | Dinas Kominfo | |

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA